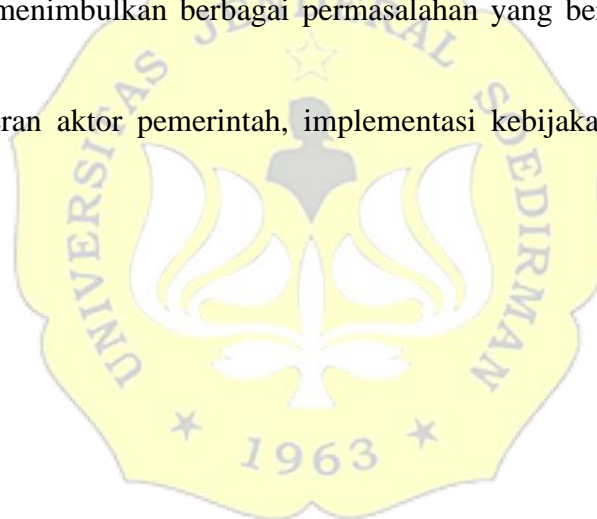


RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktor pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan peraturan turunannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Pemerintah telah melakukan upaya pelindungan terhadap PMI berupa penetapan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI, seperti PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI dan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial PMI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ditetapkannya undang-undang dan peraturan turunan pelaksana mengenai pelindungan PMI tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PMI. Namun, pada proses implementasinya di lapangan, aktor-aktor yang berperan dalam undang-undang tersebut masih belum berjalan sesuai dengan tupoksinya dan menimbulkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan PMI.

Kata Kunci: peran aktor pemerintah, implementasi kebijakan, pekerja migran Indonesia



SUMMARY

This research aims to determine the role of government actors in protecting Indonesian Migrant Workers as stated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PPMI) and its derivative regulations. To achieve this goal, data collection in this research used the literature study method. The government has made efforts to protect PMI in the form of establishing derivative regulations from Law Number 18 of 2017 concerning PPMI, such as PP Number 59 of 2021 concerning Implementation of PMI Protection and Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2023 concerning PMI Social Security. The results of the research show that the enactment of implementing laws and derivative regulations regarding the protection of PMI aims to overcome various problems faced by PMI. However, in the implementation process in the field, the actors who played a role in the law still did not comply with their main duties and functions and gave rise to various problems related to PMI.

Keywords: *the role of government actors, policy implementation, Indonesian migrant workers*

